

# JURNAL

# HI

Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Nuzulul Azmie

## **[ UPAYA UNI EROPA MENDORONG DEMOKRATISASI DAN PASAR BEBAS DI UKRAINA TAHUN 2014-2015]**

Sebuah penelitian mengenai Upaya Uni Eropa terhadap Ukraina dalam hal Mendorong Demokratisasi dan Pasar Bebas.

**UPAYA UNI EROPA MENDORONG DEMOKRATISASI DAN PASAR BEBAS DI  
UKRAINA TAHUN 2014-2015**

*(European Union Efforts To Support Democratization And Free Markets In The Ukraine  
In 2014-2015)*

**Nuzulul Azmie  
20140510019**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, 55183**

**Abstract**

*The European Union is an international organization that oversees countries in the European continent that have become members of the European Union. The European Union has aspirations to expand its territory, using the second pillar, the Common Foreign and Security Policy dimension. One of the countries on the periphery of the European Union was Ukraine, the European Union and Ukraine to establish contractual relations in 1994 by signing the EU-Ukraine Partnership and Cooperation Agreement (PCA) which came into force in 1998. In this study will discuss EU efforts push for democratization and free market in Ukraine in 2014-2015. This study uses a qualitative method that will explain how the European Union's efforts to encourage democratization and free markets in Ukraine, with methods of data collection sourced from books, journals, articles, print media and electronic media websites. The International Organization Theory and Foreign Policy Theory is used by the author to answer the research in this paper, the European Union's efforts to promote democratization and the free market in Ukraine through the policy of ENP (European Neighborhood Policy). In the promotion of democracy, the bottom-up and top-down methods resulted in the adoption of various laws from the European Union in Ukraine and in the case of Free Market Promotion, namely in removing customs fees to reduce trade barriers using grants and loan funds.*

**Keywords: European Union, ENP, Democratization, Free Market, Ukraine**

## A. Pendahuluan

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi supranasional yang menaungi negara-negara yang ada di benua eropa yang telah menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa merupakan kesatuan ekonomi dan politik yang unik diantara 28 negara didalamnya, pertama kali ide penyatuan eropa setelah perang dunia kedua, yang pertama dilakukan adalah membantu kerjasama ekonomi, ide ini menghasilkan European Economic Community (EEC) pada tahun 1958, negara yang bergabung yaitu berjumlah enam negara, Belgium, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg dan Belanda. Setelah berjalan lancar, dua puluh dua negara lain masuk menjadi anggota EEC yang menyepakati sistem satu pasar, juga lebih dikenal dengan istilah *Internal Market*. Awalnya hanya sebagai kesatuan ekonomi murni telah berevolusi menjadi organisasi yang mencakup bidang kebijakan, mulai dari iklim, lingkungan dan kesehatan, hingga hubungan eksternal dan keamanan, keadilan dan migrasi. Perubahan nama dari EEC menjadi EU pada 1993 mencerminkan hal itu. (Union E. , European Union In Brief, 2018)

Terdapat delapan tujuan dari Uni Eropa yaitu 1.) mempromosikan perdamaian. 2.) menawarkan kebebasan, keamanan dan keadilan tanpa batas internal. 3.) pembangunan berkelanjutan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga yang seimbang, ekonomi pasar yang sangat kompetitif dengan lapangan kerja dan kemajuan sosial serta perlindungan sosial. 4.) memerangi pengucilan dan diskriminasi sosial. 5.) mempromosikan kemajuan ilmiah dan teknologi. 6.) meningkatkan kohesi ekonomi, sosial dan teritorial serta solidaritas antar negara anggota. 7.) menghargai keragaman budaya dan bahasa yang kaya 8.) membentuk serikat ekonomi dan moneter yang mata uangnya adalah euro. (Union E. , European Union In Brief, 2018)

Berawal dari Masyarakat Ekonomi Eropa yang kini menjadi Uni Eropa tentu menghasilkan banyak kebijakan kerjasama, dalam perubahan nama menjadi Uni Eropa telah tertuang dalam traktat maastrich serta dirumuskan tiga pilar kerjasama Uni Eropa yaitu, Pilar pertama European Community. Ini terdiri dari Komunitas Eropa (sebelumnya dikenal sebagai European Economic Community (EEC)). EEC didirikan pada Traktat Roma (1957). Juga di pilar ini adalah Komunitas Batubara dan Baja Eropa (ECSC) dan Komunitas Energi Atom Eropa (EUROATOM). Tanggung jawab European Community membahas inisiatif ekonomi inti Uni Eropa termasuk kebijakan sosial, kebijakan regional, dan kebijakan lingkungan yang terkait erat. Bidang utama inisiatif ekonomi adalah: serikat pabean, pasar tunggal, kebijakan pertanian bersama, serikat ekonomi dan moneter, dan kebijakan struktural

Pilar kedua, Common Foreign and Security Policy (CFSP), objek dari CFSP adalah untuk menjaga nilai - nilai umum, kepentingan fundamental dan independensi persatuan, untuk memperkuat keamanan serikat dan negara-negara anggotanya dengan segala cara, untuk menjaga perdamaian dan memperkuat keamanan internasional, sesuai dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa serta juga prinsip Helsinki Final Act dan tujuan Piagam Paris, untuk mempromosikan kerja sama internasional, untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi dan peraturan hukum, dan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. (Communities C. O., 1992)

Pilar ketiga, Justice and Home Affairs (JHA), sebagian besar merupakan wilayah baru inisiatif Uni Eropa pada saat Perjanjian Maastricht. Kerjasama dalam Justice and Home Affairs (JHA) membahas kebutuhan akan interaksi antara polisi, bea cukai, layanan imigrasi, dan kementerian kehakiman dari negara-negara anggota. Inisiatif ini muncul dari Perjanjian Schengen tahun 1985 dan 1990 untuk mengkoordinasikan kebijakan perbatasan yang dihasilkan dari pergerakan orang-orang yang lebih terbuka antara Negara-negara Anggota UNI EROPA. (Today, 2018)

Dari ketiga pilar diatas Uni Eropa mempunyai cita – cita untuk memperluas wilayah kekuasaannya, menggunakan pilar kedua yaitu dimensi Common Foreign and Security Policy yang dalam hal ini ingin melakukan kerja sama internasional, di rumuskanlah hasil dari European Commision pada tahun 2003 yang berjudul : The Wider Europe Neighbourhood, A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours isinya adalah dalam komunikasi ini mereka mengumumkan sebuah proposal untuk menyatukan berbagai kebijakan Uni Eropa terhadap negara-negara tetangganya. Tujuan dari kebijakan terpadu yang baru ini adalah menciptakan sebuah cincin negara yang ramah, stabil dan sejahtera di sekitar Uni Eropa untuk menjamin stabilitas di sepanjang perbatasan luar Uni Eropa.

Salah satu negara yang berada dalam pinggiran Uni Eropa adalah Ukraina, Uni Eropa dan Ukraina menjalin hubungan kontraktual pada tahun 1994 dengan menandatangani Persetujuan Kemitraan dan Cooperation Uni Eropa-Ukraina (PCA), yang mulai berlaku pada tahun 1998. (Maksak, 2015)

Pada abad ke-19, Ukraina berada di bawah kendali Rusia. Namun dari pertengahan abad ke-19 nasionalisme menyebar. Pada tahun 1918 sementara Rusia terlibat dalam perang sipil Ukraina menjadi independen untuk waktu yang singkat. Namun pada tahun 1921 Rusia memaksa Ukraina untuk menjadi bagian dari Uni Soviet.

Dengan runtuhnya Komunisme dan pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina sekali lagi menjadi independen. Namun transisi dari Sosialisme ke Kapitalisme sangat menyakitkan. Ukraina menderita inflasi tinggi dan penurunan ekonomi selama beberapa tahun. Namun pertumbuhan ekonomi akhirnya dimulai lagi.

Peralihan dari kediktatoran ke demokrasi juga tidak berjalan mulus. Pada akhir 2004 Viktor Yanukovych memenangkan pemilihan presiden. Namun banyak orang percaya bahwa pemilihan tersebut dicurangi dan pendukung kandidat lainnya Viktor Yushchenko mengadakan demonstrasi selama 10 hari. Akhirnya sebuah percepatan diadakan dan Yushchenko terpilih. Ia menjadi presiden di awal tahun 2005. Ini disebut Revolusi Oranye. Ukraina menderita parah dalam penurunan ekonomi 2008-2009. Namun itu sementara dan Ukraina pulih.

Pada tahun 2013 dan 2014 gelombang demonstrasi menyapu seluruh Ukraina ketika Presiden Yanukovych menolak sebuah perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Pada bulan Februari 2014 parlemen Ukraina memilih untuk menghapus Yanukovych dari kekuasaan. Setelah pemilihan baru Petro Poroshenko menjadi presiden Ukraina. Hari ini populasi Ukraina adalah 44 juta. (Lambert, 2017)

Ukraina kini menjadi negara yang sangat diperebutkan oleh Rusia dan Uni Eropa, oleh karenanya penting bagi penulis bagaimana upaya Uni Eropa untuk mendorong demokratisasi dan pasar bebas di Ukraina agar Ukraina bisa bergabung dengan Uni Eropa.

## **B. Landasan Teoritik**

### **1. Teori Organisasi Internasional**

Organisasi internasional yaitu suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama di antara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, dan sosial serta bidang lainnya (Plano & Olton, 1982)

Sedangkan menurut pandangan realis tradisional tentang organisasi internasional menekankan bahwa mereka ada untuk melakukan fungsi penting bagi negara; mereka ‘memberikan kebaikan publik, mengumpulkan informasi, memantapkan komitmen yang kredibel, memonitor perjanjian, dan umumnya membantu negara – negara memecahkan masalah yang berhubungan dengan tindakan kolektif dan memperkuat individu serta kesejahteraan kolektif’. (Jackson & Sorensen, 2014)

Uni Eropa dapat dikatakan sebagai organisasi jika mempunyai unsur – unsur didalamnya, unsur-unsur organisasi menurut Wursanto terdiri dari:

- a. Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil. Dalam hal ini orang – orang yang berada di dalam Uni Eropa merupakan representatif dari negara negara anggota Uni Eropa
- b. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (network), kebijakan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan.
- d. Peralatan (equipment), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/ bangunan/kantor).
- e. Lingkungan (environment)
- f. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna.
- g. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi. (Wursanto, 2010)

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga unsur dari unsur yang dijelaskan diatas yaitu unsur Man, Tujuan bersama, dan Peralatan agar mendapatkan penjelasan secara komprehensif Uni Eropa sebagai organisasi internasional.

## 2. Konsep Kepentingan Nasional

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. (Plano & Olton, 1982)

Sedangkan menurut Howard Lentner pengertian kebijakan luar negeri harus mencakup tiga elemen dasar dari setiap kebijakan yaitu: penentuan tujuan yang hendak dicapai (*selection of objectives*), pengerahan sumberdaya atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut (*mobilization of means*) dan pelaksanaan (*implementation*). (Jemadu, 2008)

Model kebijakan luar negeri yang mendapat pengaruh kuat dari literature kebijakan publik adalah teori rasional atau *rational choice theory*. William N. Dunn yang merupakan salah satu dari penganut teori ini dalam kebijakan publik mengatakan analisis kebijakan

merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang dilaksanakan dalam suatu proses yang bersifat politik. Dunn mengidentifikasi ada lima tahapan dasar yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan dalam kondisi yang ideal. Kelima tahapan itu mencakup agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy assesment. (Jemadu, 2008), melalui teori ini penulis akan menjelaskan hasil kebijakan Uni Eropa yang terkait dengan upaya demokratisasi dan pasar bebas di Ukraina

Para analis kebijakan luar negeri mengadopsi pemikiran dari literatur kebijakan publik untuk menganalisis proses formulasi kebijakan luar negeri dengan mengasumsikan bahwa para pembuat kebijakan luar negeri melakukan berbagai tahapan intelektual ini sebelum menentukan pilihan kebijakan yang final. Charles W Kegley dan Eugene R. Wittkopf menerapkan pemikiran rational choice model dalam menganalisis kebijakan luar negeri dan mengidentifikasi empat langkah yang ditempuh oleh para pembuat kebijakan yaitu: problem recognition and definition, goal selection, identification of alternatives, dan menentukan policy choice. Sedangkan melalui ini penulis menggunakannya untuk mengetahui apa kebijakan Uni Eropa terkait demokratisasi dan pasar bebas di luar Uni Eropa.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, dimana penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan upaya Uni Eropa mendorong Demokratisasi dan Pasar Bebas di Ukraina. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang dikumpulkan datanya dari perpustakaan, buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan *website*.

### **D. Hasil Penelitian**

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi supranasional yang menaungi negara-negara yang ada di benua eropa yang telah menjadi anggota Uni Eropa. Uni Eropa merupakan kesatuan ekonomi dan politik yang memiliki 28 negara didalamnya.

Terdapat beberapa tahap dalam pembentukan Uni Eropa, penggagasnya adalah Robert Schuman yaitu seorang menteri luar negeri Perancis bersama kelima negara anggota penggagas Uni Eropa. Diawali dengan pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun 1952, awalnya intergrasi di laksanakan di keenam negara penggagas Uni Eropa yaitu Belgium, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg dan Belanda.

ECSC adalah komunitas negara-negara The Inner Six yang bertujuan menghapus berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama tempat produk, pekerja, dan modal dari sektor batubara dan baja dari negara-negara anggota bisa bergerak dengan bebas. Pada tanggal 9 Mei 1950 (Europe Day), Robert Schuman (Menlu Perancis) mempresentasikan ide-idenya dalam misi penyelamatan Eropa sehingga terbentuk European Coal and Steel Community (ECSC). ECSC akhirnya ditandatangani pada Traktat Paris (18 April 1951) oleh 6 negara pionir yang juga merupakan anggota Council of Europe. ECSC resmi dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1952 s/d tahun 2002. Dalam pelaksanaannya ECSC terbukti ampuh menjaga “keharmonisan” Eropa selama hampir setengah abad. (Nugraha, 2012)

Setelah terbentuk ECSC, dibentuklah European Economic Community dan European Atomic Community (EUROATOM). Pada tahun 1957 enam anggota pendiri memutuskan untuk membuat Komunitas Atom Eropa untuk penelitian dalam pemanfaatan energi nuklir dan pemanfaatan damai lainnya serta komunitas ekonomi yang dibangun di sekitar gerakan bebas pekerja, barang dan jasa. Bea cukai atas barang-barang manufaktur dihapuskan dan kebijakan umum terutama dalam kebijakan pertanian dan kebijakan perdagangan luar negeri harus ditetapkan.

Dalam hal membantu kerjasama ekonomi, menghasilkan European Economic Community (EEC) pada tahun 1958, negara yang bergabung yaitu berjumlah enam negara, Belgium, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg dan Belanda.

Berdirinya EEC atas dasar Traktat Roma (Treaty of Rome) yang kemudian mulai berlaku sejak tanggal satu Januari 1958. Traktat Roma dengan jelas mempertegas orientasi kerjasama EEC di kawasan. Organisasi tersebut juga masih di pelopori oleh keenam negara di atas. Pada wadah EEC mulai terlihat adanya kesadaran dari keenam negara anggota tersebut dimana masalah perekonomian juga ternyata sangat penting untuk dibicarakan bersama. ECC kala itu sudah memberlakukan beberapa hal yang telah menjadi tradisi dan kini telah di modifikasi di dalam Uni Eropa, yaitu;

1. Mengadakan peraturan bea ekspor, impor ringan di antara negara – negara anggota
2. Memudahkan prosedur, peraturan penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) di negara – negara anggota

3. Membuka lingkungan yang luas bagi warga negara anggota untuk bekerja di wilayah negara anggota lainnya, dan
4. Melancarkan proyek bersama dalam bidang perekonomian (SamUni Eropal, 2017).

Terkait dengan kebijakan pasar bebas yang diwujudkan dalam EEC, maka tujuan dibentuknya EAEC/Euratom juga terkait dengan pergerakan bebas sumber produksi, distribusi, dan riset yang diperlukan untuk pengembangan sumber energi yang berbasis kepada penggunaan nuklir antar sesama negara anggota. EEC dan EAEC (Euratom) resmi diberlakukan pada tahun 1958.

ESCS, EEC dan Euratom resmi disatukan (merger) menjadi European Community (EC) atau Masyarakat Eropa pada bulan Juli 1967. Kerjasama ekonomi yang disepakati pada EEC segera diterapkan, sehingga pada tahun 1968 semua tarif yang ada antar negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya. (Nugraha, 2012)

Uni Eropa mendukung Ukraina dalam memastikan masa depan yang stabil, sejahtera dan demokratis bagi semua warganya. Uni Eropa tidak tergoyahkan dalam mendukung integritas dan kedaulatan teritorial negara itu dan melihat implementasi penuh perjanjian Minsk sebagai dasar solusi politik yang berkelanjutan terhadap konflik di timur negara itu. Sejak musim semi 2014, UE telah meningkatkan dukungannya untuk reformasi ekonomi dan politik di Ukraina. (Action, European Union External Action, 2016)

Ukraina adalah mitra prioritas untuk Uni Eropa juga dalam Kemitraan Timur Uni Eropa. Perjanjian Asosiasi, termasuk Kawasan Perdagangan Bebas Dalam dan Komprehensif (DCFTA) antara Uni Eropa dan Ukraina dinegosiasikan antara 2007 dan 2011 dan ditandatangani pada 21 Maret dan 27 Juni 2014. Ini menggantikan kerangka kerja sebelumnya untuk kerja sama. Perjanjian Asosiasi adalah alat utama untuk membawa Ukraina dan Uni Eropa lebih dekat: mempromosikan hubungan politik yang lebih dalam, hubungan ekonomi yang lebih kuat dan penghormatan terhadap nilai-nilai bersama.

Bagian dari Perjanjian Asosiasi telah diterapkan sejak 1 November 2014. Hal ini telah meningkatkan kerjasama Uni Eropa-Ukraina tentang hak asasi manusia, kebebasan dasar dan supremasi hukum; dialog politik dan reformasi; pergerakan orang; dan memperkuat kerjasama di sejumlah sektor, termasuk, energi; lingkungan dan aksi iklim; mengangkut; jasa

keuangan; keuangan publik, termasuk anti-penipuan; pertanian dan pembangunan pedesaan; kebijakan perikanan dan kelautan; perlindungan konsumen dan masyarakat sipil.

Pada bulan Juli 2017 proses ratifikasi Perjanjian Asosiasi di sisi Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya selesai yang memungkinkan Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.

Ukraina juga merupakan negara mitra utama dalam ENP dan Kemitraan Timur yang terakhir melibatkan semua negara Uni Eropa serta Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republik Moldova dan Ukraina. Diskusi reguler diadakan mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, termasuk melalui KTT Uni Eropa-Ukraina yang diadakan setiap tahun.

Pada 1 September 2017, Perjanjian Asosiasi UE-Ukraina datang dengan kekuatan penuh. Perjanjian Asosiasi termasuk bagian Perdagangan Bebas Mendalam dan Komprehensif (DCFTA) adalah alat utama untuk membawa Ukraina dan Uni Eropa lebih dekat. The DCFTA menawarkan Ukraina kerangka kerja untuk memodernisasi hubungan perdagangan dan untuk pembangunan ekonomi dengan membuka pasar dan harmonisasi hukum, standar dan peraturan di berbagai sektor. Ini akan membantu menyelaraskan sektor-sektor utama ekonomi Ukraina dengan standar Uni Eropa.

DCFTA telah diterapkan sejak 1 Januari 2016 merupakan tonggak utama dalam hubungan perdagangan bilateral dan menawarkan peluang ekonomi baru baik bagi UE maupun Ukraina. Bisnis Ukraina menerima akses preferensial yang stabil dan dapat diprediksi ke pasar terbesar di dunia, dengan lebih dari 500 juta konsumen. Bisnis UE dapat memperoleh manfaat dari akses yang lebih mudah ke pasar Ukraina dan membangun hubungan baru dengan pemasok dan mitra Ukraina.

European Neighbourhood Policy yang disingkat ENP adalah sebuah kebijakan dari Uni Eropa untuk mengatasi negara – negara yang berada di pinggiran negara eropa dalam rangka reformasi ekonomi dan perdagangan, kebijakan imigrasi, reformasi institusional, penelitian terpadu dan pendidikan tinggi untuk sebuah tujuan besar yaitu membuat lingkaran kestabilan, harmonis dan negara makmur di sekitar Uni Eropa.

Kebijakan ini di buat pada tahun 2004 dengan isinya merupakan pembaharuan-pembaharuan kebijakan Uni Eropa yang sebelumnya terkait dengan negara pinggiran yang lebih populer disebut border country seperti kebijakan TACIS, MEDA, PHARE yang

semuanya itu merupakan kebijakan Uni Eropa untuk negara-negara yang berada di sekitar Uni Eropa. (Edzard Wesselink, 2012)

Uni Eropa memiliki interdependensi dengan negara – negara tetangganya dalam fokus yang lebih tajam. Pesatnya arus pengungsi ke Uni Eropa untuk menemukan masa depan yang baik berimplikasi pada krisis energi, untuk mengatasi krisis energi ini perlu bekerjasama dengan negara tetangga dalam hal pengamanan energi berupa diversifikasi sumber energi, jalur penyaluran, pemasok serta transfer tenaga kerja.

Orientasi pragmatis dari ENP adalah menekankan perluasan perdagangan dan hubungan ekonomi. Hal ini terjadi seperti halnya kebijakan asosiasi klasik di Komisi Eropa dengan tujuan menciptakan antara komisi eropa dan negara – negara tetangganya, kawasan perdagangan bebas untuk barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat diperluas dari yang sifatnya bilateral ke multilateral melalui integrasi lebih lanjut di masing – masing tetangga.

#### Sistematika Kerja ENP

- a. **Promosi Demokrasi** : Metode promosi demokrasi dapat disalurkan top-down atau bottom-up.

Saluran top-down untuk promosi demokrasi mengacu pada promosi demokrasi yang diarahkan pada lingkup politik, lembaga negara dan elit politik. Para elit memiliki peran sentral dalam meningkatkan demokratisasi. Mereka yakin dan terlatih dalam perilaku demokratis dan diharapkan untuk membangun institusi demokratis. Para elit bernegosiasi dan tawar menawar di arena internasional dengan aktor pro-demokrasi. Namun strategi promosi demokrasi menghadapi masalah bahwa transisi ke rezim demokratis adalah periode destabilisasi di mana elit didorong untuk menyeimbangkan ketegangan internal.

Saluran bottom-up melibatkan promosi demokrasi yang diarahkan pada masyarakat sipil. Demokratisasi dari bawah terdiri dari penargetan organisasi-organisasi sosial dan sosio-ekonomi, asosiasi dan gerakan untuk menjadi pro-demokrasi. Sebagai contoh masyarakat sipil pro-demokratis yang dinamis dapat mempromosikan demokrasi dengan mendidik warga ke dalam kesadaran politik. Ini membutuhkan kesadaran demokrasi di dalam masyarakat sipil dan kesediaan untuk bekerja melawan rezim diktator untuk mendukung demokrasi ini. (Stetter, 2003) Jika masyarakat sipil lemah dan tidak berorientasi demokratis promosi demokrasi melalui bottom-up tidak mungkin berhasil. (Silander, 2005)

- b. Promosi Pasar Bebas :** Menawarkan kepada negara-negara tetangga prospek kepemilikan di Pasar Internal atau Internal Market Uni Eropa berdasarkan pendekatan legislatif dan kebijakan, partisipasi dalam sejumlah program Uni Eropa dan hubungan interkoneksi dan fisik yang lebih baik dengan Uni Eropa.

Manfaat ekonomi dari proses ini diharapkan menjadi substansial dan bertambah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pengurangan hambatan tarif dan non-tarif untuk perdagangan harus membawa keuntungan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi pasar yang meningkat. Efek tidak langsung terutama di negara-negara mitra bahkan lebih besar.

Dengan membawa negara tetangga lebih dekat ke model ekonomi Uni Eropa juga melalui penerapan praktik terbaik internasional, ENP dan khususnya perluasan yang diusulkan dari pasar internal akan meningkatkan iklim investasi di negara-negara mitra. Ini akan memberikan lingkungan yang lebih transparan, stabil dan memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta. Dampak positif pada arus masuk investasi langsung asing diharapkan sebagai akibat dari lingkungan kebijakan yang lebih menguntungkan, mudahnya perdagangan dan murah biaya transaksi, biaya tenaga kerja relatif yang menarik dan risiko berkurang.

### **1. Implementasi Promosi Demokratisasi :**

- a. Pihak berwenang Ukraina menyetujui usulan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eropa untuk membentuk Panel Penasihat Internasional yang meliputi penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia pada periode dari November 2013 hingga Februari 2014
- b. Undang-undang tentang penyiaran publik diadopsi oleh parlemen Ukraina yang bertujuan untuk mengubah layanan penyiaran negara menjadi layanan publik yang independen.
- c. Parlemen Ukraina mengadopsi undang-undang tentang pemulihan kepercayaan di pengadilan, mengubah proses di mana para hakim secara berlebihan berada di bawah para presiden pengadilan dan membuat para hakim pengadilan dan hakim independen dari otoritas politik
- d. Parlemen mengadopsi undang-undang baru tentang penuntutan publik yang sebagian besar memperhitungkan rekomendasi Komisi Venesia. Beberapa langkah diambil oleh pemerintah, administrasi kepresidenan dan parlemen untuk menerapkan

kebijakan antikorupsi. Perubahan pada undang-undang anti-korupsi diadopsi pada bulan Mei 2014, memperkuat ketentuan pengungkapan aset oleh:

- memperkenalkan mekanisme kontrol eksternal;
- mengkriminalisasi semua jenis suap (aktif dan pasif);
- menambahkan aturan tentang korupsi di sektor swasta dalam hal orang hukum; dan
- meningkatkan hukuman

## **2. Implementasi Promosi Pasar Bebas**

- a. Dukungan resmi mendekati EUR 7 miliar yang diterima Ukraina pada tahun 2014 sebagai bagian dari program dukungan internasional IMF untuk Ukraina. Uni Eropa mencairkan pinjaman senilai 1,36 miliar euro kepada Ukraina di bawah dua program bantuan keuangan makro dan memberikan 250 juta EUR dalam bentuk hibah dukungan anggaran untuk pembangunan institusi.
- b. Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Ukraina. Yang didalamnya ada undang-undang tentang standarisasi dan meterologi telah diadopsi, seperti juga undang-undang baru tentang peraturan teknis dan penilaian kesesuaian. Pekerjaan dilanjutkan dengan merevisi legislasi teknis lainnya tetapi ini tidak menghasilkan adopsi peraturan baru (lebih karena kompleksitas teknis daripada kurangnya kemauan politik). Kerjasama yang sedang berlangsung di bidang ini termasuk program senilai 45 juta euro untuk mempromosikan perdagangan timbal balik dengan menghapus hambatan teknis untuk perdagangan antara Ukraina dan UE.

## **E. Kesimpulan**

Berawal dari Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang mempunyai tujuan antara lain pembangunan berkelanjutan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga yang seimbang, ekonomi pasar yang sangat kompetitif dengan lapangan kerja dan kemajuan sosial serta perlindungan sosial kemudian meningkatkan kohesi ekonomi, sosial dan teritorial serta solidaritas antar negara anggota maka penting bagi Uni Eropa mengimplementasikan tujuannya tersebut.

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut perlu sebuah strategi dan alat, dalam hal ini strategi bisa dikaitkan dengan cara kerja kebijakan dan dalam hal ini alat yaitu Uni Eropa

itu sendiri. Uni Eropa sebagai organisasi Internasional memiliki kebijakan luar negeri untuk negara-negara tetangga yaitu antara lain ada TACIS, MEDA dan ENP.

European Neighbourhood Policy yang disingkat ENP adalah sebuah kebijakan dari Uni Eropa untuk mengatasi negara – negara yang berada di pinggiran negara eropa dalam rangka reformasi ekonomi dan perdagangan, kebijakan imigrasi, reformasi institusional, penelitian terpadu dan pendidikan tinggi untuk sebuah tujuan besar yaitu membuat lingkaran kestabilan, harmonis dan negara makmur di sekitar Uni Eropa

Kemudian penulis menganalisis upaya Uni Eropa dalam pembuatan kebijakan ENP di dalam Uni Eropa kebijakan harus di melalui prosedur yang diawali dari Komisi Eropa, Komisi Eropa lah yang mempunyai kewenangan untuk menginisiasi kebijakan baru dan hasilnya berupa proposal dalam hal ENP nama proposalnya adalah The Wider Europe. Kemudian setelah proposal jadi dikirim ke Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa sebagai lembaga legislasi, ketika di kedua lembaga legislasi proposal tersebut di setuju maka kebijakan tersebut sudah mulai berlaku, ENP sendiri mulai berlaku pada tahun 2014.

Pilar penting dalam ENP yang penulis analisis adalah upaya promosi demokratisasi dan pasar bebas di negara – negara yang mengikuti kebijakan ENP, upaya promosi demokrasi melalui dua cara yaitu top – down dan bottom – up. Kemudian upaya mendorong pasar bebas yaitu melalui cara menghilangkan hambatan perdagangan dan mengusahakan seluruh negara yang bergabung dalam internal market Uni Eropa.

Dalam hal ini Uni Eropa dan Ukraina menjalin hubungan kontraktual pada tahun 1994 dengan menandatangani Persetujuan Kemitraan dan Cooperation Uni Eropa-Ukraina (PCA) yang mulai berlaku pada tahun 1998 yang kebijakan PCA kini telah masuk dalam kerangka ENP.

Upaya demokratisasi dari Uni Eropa untuk Ukraina tahun 2014 yaitu melalui terciptanya reformasi Undang – Undang tentang pemilihan presiden dan pembentukan Panel Penasihat Internasional dll. Kemudian upaya promosi pasar bebas melalui pemijaman uang untuk kelancaran perekonomian di Ukraina yang jumlahnya sangat besar.

## Daftar Pustaka

- Action, E. U. (2016, Mei 16). *European Union External Action*. Diambil kembali dari European Union External Action: [https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/1937\\_en](https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/1937_en)
- Action, E. U. (2017, November 6). Fact Sheet : EU - Ukraine Relations. *November*, hal. 1.
- Adrian, G. (2014, 03 18). *Crimea, Mengapa Engkau Begitu Diperebutkan ?* . Diambil kembali dari Foreximf.com: <http://www.foreximf.com/trading-strategy/crimea-mengapa-engkau-begitu-diperebutkan/>
- Antoaneta, D., & Pridham, G. (2004-2005). International Actors and Democracy Promotion in Central and Eastren Europe: The Integration Model and its Limits. *Democratization*, 92.
- Comission, E. (2018, Februari 19). *TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States)*. Diambil kembali dari European Comission: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-92-54\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-92-54_en.htm)
- Communities, C. O. (1992). Treaty On European Union. *Maastritch Treaty* (hal. 11, 123, 131). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Communities, C. o. (t.thn.). European Neighbourhood Policy : Strategy Paper. *COMMUNICATION FROM THE COMMISSION*, 14.
- Edzard Wesselink, R. B. (2012, January). Overview of the European Neighbourhood Policy : Its History, Structure, and Implementation Policy Measures. *Search Working Paper*, hal. 7.
- Fontaine, P. (2014). *The European Union explained: Europe in 12 lessons*. Brussel: European Commission Directorate-General for Communication Publications .
- Georgia, P. O. (1990, Oktober 3). *Parliament Of Georgia*. Diambil kembali dari Parliament Of Georgia: [www.parliament.ge/files/1\\_901\\_108571\\_2.pdf](http://www.parliament.ge/files/1_901_108571_2.pdf)
- Goksel, P. N. (2017, 12 18). *European Neighbourhood Policy and Democracy Promotions*. *Dokuz Eylul University, Departement of International Relations*. Diambil kembali

- dari European Neighbourhood Policy and Democracy Promotions:  
<http://www.jhubc.it/ePCR-istanbul/virtualpaperroom/062.pdf>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2014). *Pengantar Studi Hubungan Internasional; Teori dan Pendekatan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Joewono, B. N. (2010, Juli 27). *www.kompas.com*. Diambil kembali dari *www.kompas.com*:  
<https://nasional.kompas.com/read/2010/07/27/21370053/Jumlah.Penduduk.Eropa.Tembus.500.Juta>
- Kahraman, S. (2005). THE EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY, THE EUROPEAN UNION'S NEW ENGAGEMENT. *PERCEPTIONS*.
- Lambert, T. (2017). *A SHORT HISTORY OF UKRAINE*. Diambil kembali dari *A SHORT HISTORY OF UKRAINE*: <http://www.localhistories.org/ukraine.html>
- Law, E. U. (2007, April 12). *Eur-Lex*. Diambil kembali dari Eur-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:r15006>
- Maksak, H. (2015). *Reassessing The European Neighbourhood Policy*. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Makuch, A. (2018, Juli 11). *Encyclopedia Britannica*. Diambil kembali dari *Encyclopedia Britannica*: <https://www.britannica.com/place/Ukraine>
- McFaul, M. (2004-2005). Democracy Promotion as A World Value. *The Washington Quarterly*, 148.
- Nugraha, F. M. (2012, April 14). *Nederindo*. Diambil kembali dari *Nederindo*:  
<http://nederindo.com/2012/04/sejarah-terbentuknya-uni-eropa/>
- Plano, J. C., & Olton, R. (1982). *The International Relations Dictionary*. England: Clio Press Ltd.
- Policy, E. U. (2015). *JOINT STAFF WORKING DOCUMENT : Implementation of the European Neighbourhood Policy in Ukraine*. Brussels: European Commission.

- Raffaella A. Del Sarto, T. S. (2005). From EMP to ENP : Whats's at Stake with the European Neighbourhood Policy towards the Southern Mediterranean? *European Foreign Affairs Review*, hal. 20-21.
- Saeno. (2014, 03 27). *Kabar 24 : Pendudukan Crimea: Putin Siap Tandingi Uni Eropa Dengan Uni Eurasia*. Diambil kembali dari Kabar 24:  
<http://kabar24.bisnis.com/read/20140327/19/214435/pendudukan-crimea-putin-siap-tandingi-uni-eropa-dengan-uni-eurasia>
- Samuel, R. (2017). *Uni Eropa*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Sherrill, C. (t.thn.). Promoting Democracy : Results of Democratization Efforts in the Philippines. *Asian Affairs*, 212.
- Silander, D. (2005). Democracy From The Outside-in? *Social Alternatives*, 29.
- Stetter, S. (2003). Democratization without Democracy? The Assistance of the European Union for Democratization Processes in Palestine. *Mediterranean Politics*, 153.
- Today, E. 4. (2018, 02 06). *EU Organizations / Three Pillars*. Diambil kembali dari EU Organizations | Three Pillars:  
<http://pages.uoregon.edu/euro410/eutoday/organizations.php?menu#>
- Union, C. o. (1993). *Presidency Conclusions : Copenhagen European Council*. Copenhagen: European Council.
- Union, E. (2018, April 29). *European Union*. Diambil kembali dari European Union:  
[https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_en)
- Union, E. (2018, 02 04). *European Union In Brief*. Diambil kembali dari European Union:  
[https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief\\_en](https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en)
- Wursanto, I. (2010). *Dasar - Dasar Ilmu Organisasi*. Andi Publisher.